



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Daerah. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Badan Pendapatan Daerah** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

Berdasarkan informasi yang kami terima Badan Pendapatan Daerah telah berupaya menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya dengan cara mereviu dan memperbaiki dokumen perencanaan, memastikan kesesuaian penjabaran kinerja, mereviu rencana aksi, menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi serta meningkatkan kapasitas evaluator.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Badan Pendapatan Daerah**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **76.45** dengan predikat “**BB**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**”, yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	28.5	27.25	90.83%
b. Pengukuran Kinerja	30	27.2	20	66.67%
c. Pelaporan Kinerja	15	9.7	9.7	64.67%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20.5	19.5	78.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	85.9	76.45	
Predikat SAKIP		A	BB	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Daerah. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

Catatan yang harus diperhatikan diantaranya yaitu :

1. DPA belum ditandatangani dan dicap oleh PPKD
2. Tabel IKU berbeda dengan contoh di standar bukti dukung
3. Reviu terhadap dokumen perencanaan belum dilengkapi dengan bukti dukung

2.) Pengukuran Kinerja

Catatan yang ditemukan diantaranya yaitu, belum terdapat notulensi yang valid dan dokumen before after terkait kegiatan pengukuran kinerja

3.) Pelaporan Kinerja

Catatan yang harus diperhatikan diantaranya, yaitu :

1. Bukti dukung tidak menunjukkan LKIP diketahui atau mendapat perhatian dari seluruh pegawai
2. Materi utama yang disampaikan dari rapat tersebut belum menjelaskan secara rinci langkah yang akan diambil untuk perbaikan kinerja/pencapaian target

4.) Evaluasi Internal

Catatan yang harus diperhatikan yaitu, belum terdapat bukti dukung yang memadai bahwa Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

Terhadap kondisi tersebut, kami merekomendasikan agar melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan untuk memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis telah memenuhi kriteria SMART dan telah sesuai dengan standar bukti dukung.

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

Terhadap kondisi tersebut, kami merekomendasikan agar melakukan reviu terkait kegiatan pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan kinerja organisasi telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan dengan didukung dengan bukti yang akuntabel

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

Terhadap kondisi dimensi pelaporan tersebut di atas, kami merekomendasikan :

1. LKIP bisa diinformasikan ke seluruh pegawai agar bisa menjadi perhatian bersama
2. Agar menyampaikan hasil evaluasi yang menjelaskan langkah yang diambil agar LKIP dijadikan pedoman dalam pencapaian target yang telah ditentukan

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

terhadap kondisi dimensi evaluasi di atas, kami merekomendasikan mengevaluasi kegiatan self assesment untuk memastikan bahwa evaluasi internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dengan didukung dokumen hasil evaluasi (before, after)

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Badan Pendapatan Daerah. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Badan Pendapatan Daerah. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka